

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG**  
**IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH            KABUPATEN MAGELANG            NOMOR 7 TAHUN 2005            TENTANG IZIN USAHA            INDUSTRI, IZIN            PERLUASAN DAN TANDA            DAFTAR INDUSTRI</p>				<p>1. sehubungan dengan adanya:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021</p>	<p>Mendasarakan hal tersebut diatas kami rekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlu dilakukan pencabutan terhadap Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 karena secara normatif materi muatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. tidak perlu disusun perda baru sebab Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</p> <p>e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan NonPerizinan</p> <p>materi muatan dalam Perda</p>	<p>Berusaha dan Nonperizinan, yang didalamnya telah mengatur perizinan berusaha pada masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana dalam PP No 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi: (Pasal 4) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau</li> <li>b. perizinan berusaha berbasis risiko.</li> </ul> </li> <li>• Sektor perindustrian termasuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. (Pasal 7 ayat (1)).</li> <li>• Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: (Pasal 10 ayat (1)) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;</li> </ul> </li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan</p> <p>c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selanjutnya, Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha tercantum dalam lampiran I PP No 5 Tahun 2021.</li> <li>• Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sektor tercantum dalam Lampiran II PP No 5 Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran III PP No 5 Tahun 2021.</li> <li>• Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (Pasal 12 ayat (1)).</li> <li>• Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar.</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>(Pasal 13 ayat (1)).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa: a. NIB; dan b. izin.</li> </ul> <p>Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian diatur dalam Permenperin No 9 Tahun 2021.</p> <p>Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, yang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>didalamnya telah mengatur perizinan berusaha pada masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.</p> <p>Secara formil sistematika dan teknik penyusunan Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>berdasarkan lampiran II angka 237 UU No 12 Th</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2011 bahwa Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;</li> <li>b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</li> <li>c. esensinya berubah,</li> </ul> <p>Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p> <p>Mendasarakan hal tersebut diatas kami rekomendasikan:</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>1. perlu dilakukan pencabutan terhadap Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 karena secara normatif materi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. tidak perlu disusun perda baru sebab Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, yang didalamnya telah mengatur perizinan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					berusaha pada masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.	
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah perlu diterbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	konsideran menimbang	Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.					
2.	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat.	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor. 36);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3124);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor</p>				<p>dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini ada yang sudah mengalami perubahan yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</p> <p>6. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan</p>				<p>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>5. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Nomor 4389);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri</p>				<p>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran</p>				<p>38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-</p>	



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Nomor 3838);</p> <p>12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1986 tentang Kawasan Industri;</p> <p>13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;</p> <p>14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D Nomor</p>				<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>Adanya peraturan perundang-undangan yang telah diubah maupun dicabut, maka dasar hukum mengingat Perda ini kami rekomendasikan untuk diubah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>12);</p> <p>15.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72 Tahun 2001 Seri D Nomor 71);</p> <p>16.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).</p>					
3	Dengan Persetujuan Bersama				•	1.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Magelang</li> <li>3. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;</li> <li>4. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi</li> </ol>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perancangan industri;</p> <p>5. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;</p> <p>6. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;</p> <p>7. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi, merupakan bagian dari jenis industri;</p> <p>8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produk barang/jasa dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Juga Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>9. Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Industri yang perluasan kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;</p> <p>10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah Tanda Daftar yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>11. Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohon untuk mengubah status sebagai akibat adanya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepemilikan perusahaan;					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II P E R I Z I N A N</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Izin Usaha Industri (IUI)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI;</p> <p>(2) IUI diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi di lahan peruntukan industri;</p> <p>(3) IUI dimaksud ayat (1) diberikan kepada</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perusahaan Industri yang telah memenuhi perundang-undangan yang berlaku, meliputi Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi;</p> <p>(4) IUI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun se kali wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi);</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>(2) Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUI;</p>					
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 2 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa tahap persetujuan prinsip;</p> <p>(2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana produksi yang diperlukan, serta sebagai persyaratan untuk pengajuan izin-izin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>(3) Persetujuan Prinsip</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berlaku selama 4 (empat) tahun dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil;</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum;</p> <p>(5) Syarat-Syarat Pengajuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Persetujuan Prinsip adalah:</p> <p>a. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukkan aslinya).</p> <p>b. Foto Copy KTP Pemilik/Pimpinan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya).</p> <p>(6) Tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>					
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) IUI yang tidak melalui tahapan Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai berikut:</p> <p>a. Berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin;</p> <p>b. Jenis atau komoditi yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan;</p> <p>(2) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku .</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Syarat-syarat Pengajuan IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah :</p> <p>a. Foto copy Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukkan aslinya);</p> <p>b. Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya)</p> <p>c. Foto copy NPWP</p> <p>d. Surat Ijin HO</p> <p>e. UKL dan UPL/AMDAL</p> <p>f. Struktur Organisasi</p> <p>g. Izin Lokasi</p> <p>h. Izin Mendirikan Bangunan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Syarat-syarat Pengajuan Pendaftaran ulang IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut :</p> <p>a. Menyerahkan IUI asli</p> <p>b. Foto copy Pendirian Badan Usaha ( untuk non perorangan) Foto copy KTP pimpinan / pemilik perusahaan.</p> <p>(3) Tata Cara Pengajuan IUI dan Pendaftaran Ulang IUI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>					
9.	<p>Bagian Kedua Tanda Daftar Industri Pasal 7</p> <p>(1) Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki</p>				a.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>IUI sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki TDI;</p> <p>(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>(3) Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya di bawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat usaha dibebaskan dari kewajiban memiliki TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bila dikehendaki oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan;</p> <p>(4) Syarat-syarat untuk mengajukan TDI adalah:</p> <p>a. Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukkan aslinya);</p> <p>b. Surat Pengantar Kepala Desa/Kelurahan;</p> <p>c. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha (untuk non perorangan);</p> <p>d. Surat Izin HO (bagi usaha yang menurut</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundangan diwajibkan memiliki Izin HO);</p> <p>(5) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun wajib melaksanakan daftar ulang;</p> <p>(6) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.</p> <p>(7) Syarat-syarat Pengajuan Pendaftaran ulang TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sebagai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berikut; a. Menyerahkan TDI asli b. Foto copy Pendirian Badan Usaha (untuk non perorangan); c. Foto copy KTP pimpinan/pemilik perusahaan. (8) Tata cara pengajuan permohonan TDI dan pendaftaran ulang TDI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.					
10	Pasal 8 (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan TDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) apabila berkembang sehingga nilai investasinya melebihi Rp 200.000.000					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mempunyai IUI;</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk mengajukan IUI bagi perusahaan industri dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan ditambah syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Foto copy TDI (dilegalisir atau menunjukan aslinya);</p> <p>b. Neraca Perusahaan.</p> <p>(3) Tata cara pengajuan permohonan IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Keputusan Bupati.					
11.	<p data-bbox="296 305 485 337">Bagian Ketiga</p> <p data-bbox="296 358 485 391">Izin Perluasan</p> <p data-bbox="344 412 436 444">Pasal 9</p> <p data-bbox="191 466 596 883">(1) Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri melebihi 30% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib mempunyai Izin Perluasan;</p> <p data-bbox="191 904 596 1045">(2) Syarat-syarat pengajuan Izin Perluasan sebagai berikut:</p> <p data-bbox="247 1066 539 1099">a. Rencana Perluasan;</p> <p data-bbox="247 1120 596 1326">b. Foto copy Pendirian Badan Usaha (dilegalisir atau menunjukan aslinya).</p> <p data-bbox="247 1347 596 1380">c. Foto copy KTP</p>				a.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pimpinan/Pemilik Perusahaan (dilegalisir atau menunjukan aslinya)</p> <p>d. Foto copy NPWP e. Surat Ijin HO f. UKL dan UPL/AMDAL g. Struktur Organisasi h. Izin Lokasi i. IMB j. Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris k. Foto copy IUI (dilegalisir atau menunjukan aslinya).</p> <p>(3) Syarat-syarat pengajuan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana perluasan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Tata cara Pengajuan Izin Perluasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .					
12.	<p style="text-align: center;">BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUI ATAU TDI Pasal 10</p> <p>(1) Menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bagi Perusahaan Industri pemegang IUI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk semester pertama pada tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya</li> </ul>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>setiap tanggal 31 Juli;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.</li> </ul> <p>b. Bagi Perusahaan Industri pemegang TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.</p> <p>(2) Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;</p> <p>(3) Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengangkutannya dan keselamatan kerja.</p> <p>(4) Tata cara penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>					
13.	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMINDAHAN DAN PERUBAHAN PERUSAHAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemindahan lokasi industri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI;</p> <p>(2) Apabila Perusahaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Industri melakukan perubahan nama, alamat dan/atau Penanggung jawab Perusahaan, maka diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI;</p> <p>(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI wajib memberikan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>persetujuan prinsip di tempat yang baru setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>(4) Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan pejabat yang berwenang memberikan IUI atau TDI tidak memberikan persetujuan tertulis, maka permohonan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui.</p>					
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Apabila IUI, Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri rusak atau hilang, maka wajib mengajukan permohonan penggantian IUI, Tanda Daftar Industri atau Izin Perluasan dengan cukup menyerahkan bukti kerusakan atau surat kehilangan dari pihak yang berwenang.</p>					
15.	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PERINGATAN,</b> <b>PEMBEKUAN DAN</b> <b>PENCABUTAN IZIN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:</p> <p>a. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 7 ayat (5),</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan (3), Pasal 11 ayat (1) dan (2);</p> <p>b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam IUI atau TDI yang telah diperoleh;</p> <p>c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa usaha industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Intelektual (HAKI).</p> <p>(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>					
16.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) IUI atau TDI dibekukan apabila:</p> <p>a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);</p> <p>b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha;</p> <p>c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya;</p> <p>d. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) wajib yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Selama IUI atau TDI yang bersangkutan dibekukan, usaha industri tersebut</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilarang melakukan kegiatan produksi;</p> <p>(3) Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUI atau TDI;</p> <p>(4) Jangka waktu pembekuan IUI atau TDI bagi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Pembekuan IUI atau TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;</p> <p>(6) IUI atau TDI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila usaha industri yang bersangkutan:</p> <p>a. Mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) IUI dan TDI dapat dicabut apabila:</p> <p>a. IUI atau TDI yang dimiliki berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;</p> <p>b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Daerah ini;</p> <p>c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas Pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>(2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;</p> <p>(3) Pencabutan IUI/TDI dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>					
18.	<p>BAB VI</p> <p>PENGAWASAN</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pengawasan usaha industri dilakukan oleh pegawai pada unit yang menangani permohonan IUI, TDI dan Izin Perluasan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.</p>					
19.	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang;</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah:</p> <p>a. Menerima, mencari,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;</p> <p>c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;</p> <p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;</p> <p>g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>					
20.	<p>BAB VIII</p> <p>SANKSI PIDANA</p> <p>Pasal 18</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal</p>	<p>berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf e PP No Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis</p>	<p>kami rekomendasikan untuk dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah);</p> <p>(2) Usaha industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997;</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam PNBPN Kejaksaan, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perda ini disharmoni dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e PP No 39 Tahun 2016.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Tindak pidana yang dikenakan pidana sebagaimana diatur ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin;</p> <p>(5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan Penerimaan Daerah.</p>					
21	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan Industri dari Direktorat Jenderal atau Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Perindag sebelum ditetapkan Peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>(2) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (7);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Permohonan Persetujuan Prinsip IUI , Izin Perluasan atau TDI yang sedang dalam proses penyelesaian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan Persetujuan Prinsip IUI , Izin Perluasan atau TDI kepada instansi yang ditunjuk .</p>					
22.	<p>BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.					
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 21</b></p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	delegasi blangko	Pasal 21 adalah delegasi blanko, berdasarkan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa, Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. selanjutnya dalam lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Pasal 21 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.</p>	
23	<p>Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>					